

IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Deskriptif di SATLAK PB Dalam Penanggulangan Bencana Kota Surabaya)

Nikitasari¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Being in the maritime area and a row of volcanoes, making Indonesia into a disaster-prone country. Flood, fire, earthquake, etc., is one of the various disasters that impact on people's lives, especially in areas that are directly affected. In 2011 the government of Surabaya faced Mayor Regulation which deals with the implementation of disaster management during emergency response in Surabaya can be done rapidly, integrated, coordinated and comprehensive, we need a disaster management guidelines for emergency response set out in the Mayor.

The problems raised in this research adalah how policies to implement emergency response, while at on any incident involving the safety of human life, should have a quick consideration of a response to the disaster with a system that is really nice and makes it easy to communicate.

This study aims to discribe emergency response implementation of which has been run since the adoption of SATLAK PB by Perwali Surabaya .. this research was conducted using qualitative descriptive technique of determining informants purposively. Data obtained through in-depth interviews, observation and documentation. The process of data analysis was done by grouping and combining the data obtained, and also set a series of corresponding relationships with less data. Then the validity of the data was tested with triangulasngsi data presented is valid data.

The results of this study indicate that kebijakanyang done by SATLAK PB, is the implementation is done is the need for consistency kebijakanyang firmly on Disaster Management, because in this cooperation to build various bidangbaik cooperation of provincial, national and even internasional.dan their cooperation pattern formed by the process of SATLAK PB officers and functions of each goal-oriented.

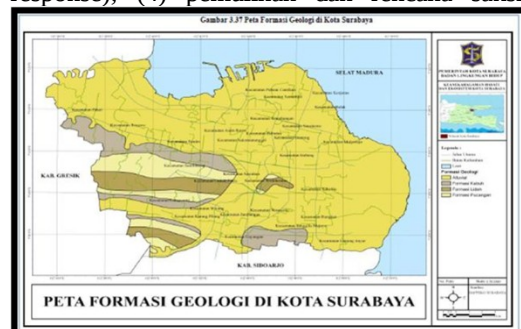
Key words: Implementation, Disaster Management, Policy

Pendahuluan

Indonesia telah dijuluki sebagai *Dissarter Supermarket*, dengan kondisi tersebut sepertinya mampu mengubah cara pandang dalam menangani bencana, birokrasi pemerintah lebih responsif terhadap kondisi darurat dengan cara kerja institusi yang lebih efektif dan efisien. Birokrasi yang ada sekarang ini adalah disiapkan untuk berhadapan dengan kondisi normal tanpa bencana, sehingga diperlukan kreatifitas dan inovasi serta perangkat dalam penanganan bencana agar kinerja birokrasi bisa lebih baik. Peraturan yang mengatur tentang manajemen bencana cenderung berdiri sendiri-sendiri, tidak intergratif dan belum ada model yang mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai sumberdaya pemerintah daerah untuk menangani bencana.

Bencana sering terjadi dimana-mana mulai dari tsunami, gempa, badai, banjir, longsor, erupsi gunung api, kekeringan dan lainnya, hal ini. Bencana yang selalu terjadi silih berganti tanpa mengenal waktu dan wilayah, kondisi alam yang tidak seimbang dan perubahan siklus iklim yang tidak sesuai mengakibatkan bencana tidak dapat diprediksi secara pasti,

hilangnya keseimbangan lingkungan akibat kerusakan alam yang tidak stabil menjadi sesuatu yang harus diatasi oleh semua pihak yang ada. Bencana menjadi semakin meluas di mana-mana sehingga pentingnya tindakan yang dilakukan secara komprehensif untuk mengurangi risiko bencana dan risiko perubahan iklim dengan melaksanakan manajemen bencana dan rencana aksi pengurangan risiko bencana lain (1) mitigasi; (2) manajemen kesiapsiagaan dan manajemen krisis; (3) kedaruratan (emergency response); (4) pemulihan dan rencana saksi.



Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan populasi lebih dari 3,1 juta (5,6 juta di area metropolitan) dan merupakan ibu

mota dari provinsi Jawa Timur. Surabaya berlokasi bagian utara Jawa Timur di mulut Sungai Mas dan sepanjang sisi Selat Madura. Bersituasi di lahan yang cukup datar, jauh dari garis kubah Indo Australia dan Filipina, dan dibatasi secara langsung oleh pulau Madura di utaranya, Surabaya secara historis telah terhindar dari bencana-bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, topan, tanah longsor, dan letusan gunung berapi.

Surabaya secara geografis jauh dari gunung berapi dan aktif dan garis kubah gempa bumi, dan tidak dilalui oleh sungai besar. Bencana paling umum yang dihadapi lingkungan perkotaan Surabaya adalah banjir dan kebakaran. Beberapa kawasan di kota Surabaya mengalami banjir sedalam 10-70 cm dengan waktu banjir maksimum kira-kira 6 jam. Banjir tersebut biasanya adalah bencana yang mulainya lambat dan terdapat waktu yang cukup untuk warga yang tinggal di kawasan yang rendah untuk dievakuasi. Banjir yang terjadi di Surabaya baru-baru ini tidak memiliki sejarah menyebabkan korban luka atau nyawa, tetapi seringkali menyebabkan kerusakan pada program dan mengharuskan perpindahan warga yang tinggal di kawasan rawan. Meskipun provinsi Jawa Timur memiliki BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Surabaya merupakan salah satu kota/daerah di Indonesia yang memiliki BPBD tingkat Lokal. Sebagai pengganti, Surabaya memiliki sistem resmi untuk penanggulangan bencana yang dinamakan SATLAK-PB (Satuan Laksana), KESBANGPOLINMAS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat) memiliki peran penting dalam mengkoordinasi organisasi penanggulangan bencana dan lainnya seperti POLRESTA, PMI, Pekerjaan Umum, TNI, TENAGA and Organisasi lain yang berpartisipasi dalam respon bencana.

Penekanan kepemimpinan dalam respon/ kesiapan bencana terlihat pada setiap tingkat pemerintahan (kota, kecamatan, dan desa) dan dilihat sebagai prioritas utama di seluruh lembaga respon darurat. Walikota saat ini, Tri Risma Harini, memiliki reputasi untuk melakukan pendekatan langsung, proaktif dan ambisius dalam menghadapi aspek pemerintahan tersebut. Visi beliau untuk kesiapan keadaan darurat terus diulang di sejumlah rapat dalam minggu tersebut. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota (DKP) DAN Kepala Penataan Kota Surabaya hingga tahun 2010, pengalaman Walikota Harini dalam kapasitas pelayanan publik lainnya telah mempertajam pemahamannya atas tantangan tanggap bencana dan solusi praktis pada masa jabatannya.

Kondisi Siaga Satlak-PB saat terjadi Bencana dalam Rekomendasi Praktek Terbaik

Menurut tingkat potensi risikonya, terdapat beberapa rekomendasi antara lain

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara fisik atau melalui pengembangan kesadaran masyarakat. Mitigasi perlu mencakup memperhatikan bagaimana pencegahan bencana, minimalis dampak dan upaya perbaikan mempengaruhi ketahanan.

- Mitigasi banjir dapat dilakukan dengan pelestarian/ konservasi pesisir dengan intensif dan mengontrol kawasan tepi sungai dan saluran-saluran air di kota Surabaya.
- Mitigasi kebakaran mencakup memperbaiki keterandalan sistem perlindungan kebakaran baik di gedung-gedung ataupun lingkungan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam pencegahan bencana dan mengontrol kebakaran.
- Aspek kesadaran masyarakat dan pendidikan dapat diaplikasikan ke semua tahap penanggulangan bencana dan perlu terus ditinjau untuk memastikan kepastian dan efektifitasnya.

Diskusi dari tinjauan prosedur Standar kesiapan bencana dan sumber daya kota Surabaya, kami ingin mengajukan pertimbangan berikut dan contoh-contoh praktek terbaik disaat anda terus memperbaiki kapabilitas tanggap bencana. Beberapa anjuran berikut hanya

mempertegas hal-hal yang sudah dilakukan masyarakat anda dengan baik.

George C, Edward III

(dalam Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a.

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran (*target group*) kebijakan harus ditransmisikan akan mengurangi distorsi implementasi.

b.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

d.

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksible.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial yang merupakan subyek-subyek yang bersangkutan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

penanganann bencana alam. Banyaknya klasifikasi bencana yang ditangani oleh SATLAK-PB Surabaya, sehingga data yang diperoleh, maka jenis penelitian yang ingin diperoleh, maka jenis penelitian yang cocok untuk penelitian implementasi kebijakan penanganann bencana alam adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subyek-subyek dan perilaku yang dapat diamati oleh peneliti (Moleong, 2010:4). Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, selain holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasan pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedang menurut Hadari Nawawi, penelitian diskriptif berusaha menggambarkan dan melukiskan suatu keadaan atas fakta-fakta yang benar-benar terjadi, sehingga peneliti diharapkan mampu memahami fenomena yang menjadi fokus dalam penelitiannya (Nawawi, 1993:63).

Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendapatkan data yang berupa kata-kata dan gambar bukan angka-angka, guna membahas dan menggambarkan secara rinci dan mendalam. Peneliti dalam penelitian ini merumuskan informan secara purposive dengan cara menyusunnya penelitian pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan utama dengan berbagai pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah jabatan atau posisi para informan yang kapasitasnya dan berkompeten untuk menjawab berbagai persoalan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik penentuan sampel ini dipilih ketika kita ingin mengetahui kaitan atau hubungan antar manusia dalam satu kelompok tertentu tertentu, atau ingin menyelidiki bagaimanakah proses penyebaran suatu informasi di suatu kalangan tertentu. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui data dan informasi mengenai implementasi kebijakan penanganann bencana alam di SATLAK-PB peneliti melakukan penggalan dan pencarian data pencarian data melalui pimpinan SATLAK-PB.

Upaya Penanggulangan Bencana oleh SATLAK PB

Rute Evakuasi

Memahami kapasitas dari rute-rute strategis yang jauh dari kawasan yang terkena dampak merupakan hal utama dalam perencanaan. Kapasitas rute-rute yang diantisipasi akan mempengaruhi keputusan apakah evakuasi diri sendiri dianjurkan dan bagaimana untuk mengelolanya.

Meningkatkan upaya-upaya untuk memetakan titik-titik dan rute-rute evakuasi dan identifikasi bagian-bagian yang rentan dari jaringan jalan dapat meningkatkan kesadaran secara keseluruhan mengenai apa yang harus dilakukan disaat situasi bencana (untuk responden dan penduduk). Upaya ini akan membutuhkan masukan dari polisi, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Informasi spesifik mengenai rute evakuasi perlu juga diintegrasikan secara resmi ke dalam rencana tindakan lokal.

Meningkatkan upaya pemetaan titik evakuasi dan rute evakuasi dan mengidentifikasi bagian-bagian jaringan jalan yang rentan. Upaya ini akan membutuhkan masukan dari KESBANGPOLINMAS, Polisi, dan dinas perhubungan. Informasi spesifik mengenai rute evakuasi perlu juga diintegrasikan secara resmi ke dalam tindakan lokal.

Membangun rute evakuasi yang realistic dan direncanakan sebelumnya dengan titik kontrol yang ditentukan dan prosedur diseminasi diintegrasikan secara resmi ke dalam rencana tindakan lokal.

- Menggunakan pengetahuan lokal dan peninjauan jalan untuk mengidentifikasi rute
- Mengidentifikasi “titik tersumbat” dimana peraturan lalu lintas dibutuhkan
- Membangun rencana yang jelas untuk komunikasi melalui media lokal
- Mengetes rute-rute evakuasi untuk mengkonfirmasi asumsi yang dibuat dalam perencanaan

Perencanaan evakuasi perlu meningkatkan titik-titik tersumbat, pengelolaan persimpangan utama, alur lalu lintas dan bagaimana untuk menggunakan infrastruktur transportasi dengan efektif, termasuk kapasitas dari transportasi umum lokal. Pengelolaan lalu lintas perkotaan dan sistem kontrol dan CCTV dapat membantu dalam mengawasi rute dan mengidentifikasi titik-titik tersumbat.

Rute dapat ditutup untuk penggunaan umum ditujukan untuk evakuasi ditunjukkan

untuk evakuasi, dan pengarahannya dapat diganti untuk meningkatkan kapasitas, Dinas Perhubungan mengatur jaringan jalan dan perlu dilibatkan dalam perencanaan tanggapan.

Penting untuk mempertahankan alur lalu lintas pada rute evakuasi. Lalu lintas stationer dapat mengurangi efektifitas evakuasi dan mengekspos korban evakuasi pada resiko yang lebih besar. Pada beberapa kasus, untuk mengontrol volume lalu lintas akan lebih baik untuk menspesifikasikan persimpangan mana yang perlu digunakan untuk mengelola akses dan mana yang perlu ditutup, sehingga lalu lintas rute evakuasi dapat berjalan lancar. Perencanaan perlu mempertimbangkan rute-rute evakuasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, sebelumnya sebagai contoh rawan banjir atau tutup karena lokasi industri diidentifikasi sebelumnya, sebagai contoh rawan banjir atau tutup karena lokasi industri diidentifikasi sebagai bahaya yang perlu dimasukkan tanggapan kecelakaan atau kerusakan dan bagaimana koordinasinya.

Tanda-tanda jalan fleksible sepanjang rute evakuasi, menggunakan infrastruktur sepanjang rute evakuasi, menggunakan infrastruktur yang telah ada, dapat membantu memfasilitasi evakuasi. Perencanaan perlu berkonsultasi dengan ahli komunikasi untuk memastikan pesan lalu lintas yang dibentuk untuk digunakan selama evakuasi tidak menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Apabila evakuasi diperkirakan akan melampaui batas lokal, akan penting untuk mengkoordinasi pesan dan memastikan konsistensi informasi untuk para korban evakuasi. Perlu juga dipertahankan dan dikelola di rute ke dalam area evakuasi untuk responder darurat, staff penting atau transportasi untuk evakuasi.

Tempat Penampungan Evakuasi

Lokasi tempat penampungan yang telah diidentifikasi sebelumnya memungkinkan isu-isu seperti kesehatan dan keamanan, kebakaran dan perubahan peraturan yang perlu dibatasi, peralatan tambahan untuk diidentifikasi dan dikelola dan untuk penyimpanan peralatan persediaan.

Rencana tempat penampungan dan evakuasi generic perlu berkaitan dengan jarak resiko, termasuk:

- Bahaya alami: banjir pesisir, banjir sungai, kerusakan bendungan
- Kecelakaan industrial: pelepasan, kebakaran atau ledakan bahan radiologis, biologis atau kimia.

- **Konflik sosial.**

Ketika resiko khusus disuatu kawasan diidentifikasi (misal pabrik industri atau zona banjir), perencanaan perlu memastikan tempat penampungan tidak akan terkena dampak. Perlu juga dipertimbangkan kemampuan memelihara persediaan energy, air dan ketahanan akses jalan dari tempat penampungan tersebut.

Rencana untuk mengidentifikasi bangunan-bangunan yang sesuai, misalnya sekolah, lapangan olah raga atau gedung masyarakat dapat digunakan sebagai tempat penampungan. Ketika praktis, bangunan – bangunan disepanjang zona perencanaan perlu diidentifikasi sebelumnya. Ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk membangun tempat setelah kejadian.

Ketika hanya sejumlah kecil orang membutuhkan tempat penampungan, atau ketika kapasitas tempat penampungan hanya sedikit melampaui, mungkin akan lebih efektif secara biaya untuk menggunakan hotel dibandingkan harus membuka tempat penampungan lain. Perencana dapat menyimpan daftar hotel-hotel lokal yang dapat digunakan dan dapat dipertimbangkan mengatur kontrak dengan penyedia akomodasi.

Bangunan yang ditentukan sebagai tempat penampungan perlu memiliki sanitasi yang cukup untuk jumlah yang diperkirakan. Dimungkinkan untuk mengakomodasi sejumlah orang di beberapa bangunan, tapi kapasitasnya sanitasi, (jumlah toilet dan kamar mandi) akan menentukan jumlah orang yang dapat ditampung.

Penjangkauan publik dan Pendidikan

Kesadaran masyarakat dan pendidikan adalah penting untuk implementasi rencana evakuasi yang sukses program perlu diinstitusikan yang meliputi informasi bahaya, kebutuhan untuk evakuasi di dalam beberapa kondisi tertentu dan tindakan-tindakan spesifik yang perlu diambil. Rencana evakuasi perlu mendelegasikan tanggung jawab untuk kesadaran masyarakat dan program pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat perlu dilakukan sebelum dampak bahaya (sebagai contoh, sebelum mulainya musim hujan di dalam kasus banjir) :

- Kesadaran masyarakat atas bahaya-bahaya, yang mungkin mengarah kepada keharusan untuk evakuasi.

- Kesadaran individu atau kondisi, yang akan mendukung keputusan perlu tidaknya evakuasi atau tempat penampungan .

Informasi publik yang efektif perlu:

- Didukung dengan program pendidikan masyarakat

- Menggunakan media yang bervariasi (cetak, elektronik, pengumuman masyarakat, bicara langsung, dll) untuk menyebarkan informasi.

- Memiliki informasi, instruksi dan arahan yang berwibawa, kredible, sederhana, langsung, dan tidak ambigu.

- Menyediakan penguatan yang konstan dan tepat waktu

Mendirikan seksi hubungan masyarakat untuk memanfaatkan waktu penyiaran radio yang disediakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi untuk sosialisasi masyarakat. Menyiarkan peringatan awal, prosedur keselamatan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bencana.

Potensi per Jenis Bencana

Mengingat letak geografis tingkat kepadatan penduduk adanya keragaman penduduk dari berbagai etnis/suku yang tinggal di Kota Surabaya, maka ada beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Surabaya, yaitu banjir, angin puting beliung, kebakaran, kegagalan teknologi dan konflik, disamping itu dapat dimungkinkan terjadinya bencana lain di luar perkiraan bencana yang berpotensi di Surabaya.

Potensi bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat adalah:

1. Bencana Banjir berupa genangan atau banjir rob
2. Bencana Angin Puting Beliung
3. Bencana Kebakaran
4. Bencana Kegagalan Teknologi
5. Bencana Konflik

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK-PB)

Penanganan tanggap darurat bencana di Kota Surabaya dilaksana oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB) yang terdiri dari bidang-bidang yang menangani urusan telah ditetapkan dalam Keputusan

Walikota Surabaya tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB), yaitu:

1. Bidang Bantuan Sosial dikoordinasi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
2. Bidang Kesehatan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
3. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi dikoordinasi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya.
5. Bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana.
6. Melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Ketua SATLAK-PB.

Bidang Penampungan dan Dapur Umum

1. Merencanakan menyediakan dan melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana untuk keperluan penampungan masyarakat yang dievakuasi akibat bencana.
2. Merencanakan, mempersiapkan dan menyediakan pelayanan makanan dan minuman bagi korban yang tertimpa bencana di lokasi penampungan yang memenuhi persyaratan.
3. Mengkoordinasikan semua kegiatan pembuatan sarana dan prasarana untuk keperluan penampungan dan penyediaan makanan/minuman bagi masyarakat yang tertimpa bencana.
4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai dengan bidangnya.
5. Bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana
6. Melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh Ketua Satlak-PB

Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana

a. Koordinator bidang yang telah melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana berkewajiban yang membuat laporan yang disampaikan kepada Ketua Pelaksana PB kepada Walikota Surabaya. Laporan tersebut meliputi pelaksanaan penanganan bencana ,

jumlah/kekuatan sumber daya manusia , jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik.

b. Laporan Ketua Pelaksana Harian Satlak-PB kepada Walikota Surabaya dipergunakan oleh Walikota Surabaya dipergunakan oleh Walikota Surabaya dan/atau pelaksana teknis sektoral sebagai bahan penetapan/pelaksanaan kebijakanterkait dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tersebut di atas disimpulkan sebagai berikut :

1. Sejak Walikota meresmikan SATLAK PB sebagai satuan pelaksana penanggulangan bencana di Kota Surabaya, sudah tertera bahwa adanya jaringan kerjasama dengan SKPD yang berpengaruh terhadap kerjasama antar instansi yang berkaitan. Dari beberapa tugas dan fungsi yang sudah dijalankan sangatlah mempunyai posisi dan disiplin di setiap bagiannya, mulai dari atasan sampai pasukannya.
2. Pelaksanaan kebijakan komunikasi yang terjalin antara: a) pemerintah kota dan SKPD dinas yang terkait; b) pemerintah kecamatan sampai kelurahan; c) kapolsek; d) koramil; e) relawan dan tokoh dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya desa tangguh bencana yang mana mereka berperan sangat penting dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang memberikan peranan terhadap keselamatan masyarakat. Adanya masalah yang muncul biasanya pada saat kesepakatan dari pengambil kebijakan kurang selaras dengan keinginan yang terjadi namun hal ini bisa diselesaikan dengan proses yang kultural dan lebih kekeluargaan.
3. Sturuktur birokrasi pada instansi pelaksana yang terkait sudah baik dan lebih kompak dalam bekerjasama semua bekerja dengan sangat bertanggung jawab, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP dan Mapping yang telah dibuat.
4. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Surabaya secara kuantitas sudah cukup memadai, tetapi secara kualitas keahlian kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam proses pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.
5. Fasilitas yang mendukung pada setiap penanggulangan dan antisipasi bencana memang sangat penting.dan dari setiap pelaksanaan sudah

cukup bagus dalam melihat keadaan sekitar yang terjadi bencana.

6. Dukungan alat IT yang benar-benar bisa mendukung semua gerak dan pasukan penanggulangan bencana selalu siap sedia dalam merespon setiap kejadian, dan mempunyai banyak jaringan yang di dalamnya mendapat banyak partisipasi antar Dinas yang terkait.

7. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan dari SATLAK PB dalam model InternGovrenmental Network yaitu:

- Faktor pendukung implementasi kebijakan dari Peraturan Walikota yang sudah tertulis dengan jelas bahwa :

a. dalam penanggulangan bencana harus didasari dengan cepat tanggap dan menjadi sistem dengan model saling koordinasi dari setiap dinas yang berkaitan.

b. Dalam setiap pelaksanaan penanggulangan bencana mempunyai bagian tersendiri dalam menanggulangi bencana semua ditata dan sudah masuk dalam SOP dan SPD yang terkait.

c. Penanganan bencana dengan cepat sangat bisa membuat korban terselamatkan dengan proses evakuasi yang memang membutuhkan banyak waktu namun terarah.

d. Peningkatan kualitas penanggulangan bencana dengan kerjasama antar jaringan dapat terjalin dengan baik, dan normal, adapun kejadian yang bersifat dadakan maka sudah ada pasukan lain yang siap mengkoordinasi pekerjaan.

e. Setiap penanggulangan bencana bisa membuat sinergi di setiap modal sosial di masyarakat dengan banyaknya jaringan yang terkait dan bisa menjadikan kemampuan dan tenaga yang bisa meng evakuasi korban pada saat bencana dengan cepat, selamat dan khidmat.

- Faktor Penghambat implementasi kebijakan dari Peraturan Walikota adalah :

a. Masih terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah.

b. Pelaksanaan otonomi daerah mengenai tanggap bencana yang masih lemah dan belum sesuai.

c. Penataan kelembagaan yang harusnya lebih diberdayakan dengan berbasis masyarakat dengan sukarelawan daya tanggap akan bencana lebih sigap.

d. Pemanfaatan IT yang belum bisa diterima masyarakat dengan sepenuhnya tahu atau gaptex, belum terlalu mengenal Teknologi.

e. Pelayanan yang mulai terjamin dari setiap hasil evakuasi dan kerja terhadap korban bencana yang kurang Sumber Dayanya.

- Untuk meningkatkan penanggulangan bencana merupakan suatu yang amat sangat penting dimana ini semua terkait dengan rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia dan alam. Dan merupakan proses pelayanan publik yang bersifat kemanusiaan.

- Kualitas dalam mensinergikan penanganan terhadap bencana alam, sangat baik dan memang masih perlu diperbaiki, namun usaha akan terus ada.

8. Dengan adanya SATLAK PB pelaksanaan penanggulangan bencana bisa berjalan baik terutama banyak yang ditambahkan melalui sistem kerjanya yaitu dengan adanya aplikasi siaga bencana dan nomor 112 sebagai nomor resmi tanggap bencana, karena komunikasi mendukung sehingga bisa menjadikan tanggap darurat lebih sigap.

Daftar pustaka

Suaedi, Falih; Nugroho, Kris ;2013;*Riset Pengembangan Regulasi dan Model Kebijakan: Pengembang Model Intergovernmental Network dalam manajemen penanganan bencana banjir di Kab. Bojonegoro, Tuban dan Lamongan*;Departemen Administrasi Negara-FISIP-UA, November 2013.

ICS.2013.*Survey Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya*.PAT(Pacific Command Augmentation Team) dalam kerjasama dengan Pemerintah Jawa Timur.

Susanto,A.B.2006.*Disaster Management*.Jakarta. PT Aksara Grafika Pratama, hal: 8-9

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*; CV Pustaka Setia; Bandung; hal: 36-37

Arianti, Indyah Hayu, 2015, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif Tentang Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)*, Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Unair Tidak Diterbitkan, Surabaya, 2015

Soetomo. 2007. *Teori-teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada. hal: 44

Abdul, Sholichin, 2008; *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara. Xii, 124, Hal: 59

Kediri, Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Unair Tidak Diterbitkan, Surabaya, 2015.